

KUISIONER PENYELENGGARAAN PBG DAN SLF

Kab/Kota Pesisir Selatan

NO.	PERTANYAAN	JAWABAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)
1	OPD, Bidang dan Seksi yg memproses PBG dan SLF (SIMBG)?	Dinas PUPR Kabupaten Pesisir Selatan, Bidang Cipta Karya, Seksi Penataan Bangunan Pengembangan Permukiman	
2	Berapa lama SOP pengurusan PBG dan SLF? (dari penyiapan data sampai rekomendasi teknis)	Maksimal 14 Hari Kerja	
3	Berapa rata-rata waktu real pengurusan PBG dan SLF? (terbitnya PBG)	Maksimal 1 Bulan	
4	Apa kendala dimasyarakat pada saat pengurusan PBG dan SLF?	1. Ditemukan beberapa Pemohon yang masih kesulitan menggunakan aplikasi SIMBG disebabkan kurang terampil dalam menggunakan teknologi digital 2. Pemohon perorangan kesulitan dalam mencari tenaga untuk membuat gambar dan perhitungan teknis, tenaga ahli untuk membuat laporan kelaikan fungsi bangunan gedung 3. Ketidaktahuan masyarakat mengurus izin lain-lain seperti izin tata ruang dan izin lingkungan 4. Jauhnya akses masyarakat menuju kantor PU dan kantor Perizinan. Walau izin PBG/SLF sekarang berbasis digital, namun mayoritas Pemohon mendatangi kantor PU untuk berkonsultasi langsung mengenai syarat dan tahap pengurusan PBG/SLF	
5	Apa kendala di penyelenggara PBG dan SLF (OPD Teknis) ?	Kesadaran masyarakat dalam pengurusan PBG masih kurang, dominan masyarakat mengurus ketika bangunan sudah jadi	
6	Sudah berapa PBG dan SLF yang diterbitkan sejak 2021 (rician pertahun)	Total PBG = 330 (Diterbitkan 149, Ditolak 1) Total SLF = 80 (Diterbitkan 35)	
7	Berapa orang Tim Profesional Ahli (TPA) dan Tim Penilai Teknis (TPT) di Kab/Kota ...	TPA = 4 orang TPT = 3 orang	TPA: 1. Prof. Dr. Ir. Nasfryzal Carlo, M.Sc., CSP.,IPU., APEC Eng 2. Oscar Fithrah Nur, M.T. 3. Ir. Yani Ridal, M.T. 4. Dr. I Nengah Tela, S.T., M.Sc. TPT: 1. Youdhi Permadi Ma'ruf, S.T. 2. Jundrivo Angga Putra, A.Md. 3. Nindy Nahwiyah, S.T.

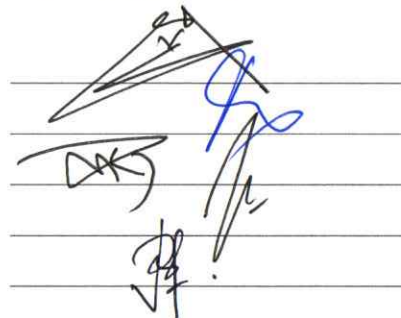
NO.	PERTANYAAN	JAWABAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)
8	Apakah penyelenggara PBG melaksanakan sosialisasi dan dalam bentuk apa?	Belum ada	
9	Apakah penetapan SHST oleh Kepala Daerah ? Kalau belum apa sebabnya?	Ada. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor: 188.4/747/Kpts/BPT-PS/2023 tentang Standar Harga Satuan Tertinggi Bangunan Gedung Negara dan Bangunan Pagar Gedung Negara Tahun Anggaran 2023	
10	Apakah Bangunan Gedung Negara di Kabupaten/ Kota sudah mempunyai PBG dan SLF?	-	
11	Berapa Persentase BGN yang sudah mempunyai PBG dan SLF dari jumlah total BGN di Kabupaten/ Kota ?	-	
12	Pada SIMBG terdapat proses penyelenggaraan PBG, SLF, SBKBG, RTB, di antara item ini proses apa saja yg sudah dilaksanakan penyelenggaraan SIMBG ?	PBG dan SLF	SBKBG belum terakomodir pada menu SIMBG
13	Kalau belum semua, apa penyebabnya?	Aplikasi SIMBG belum berjalan secara optimal	
14	Apakah ada dilakukan pengawasan berkala terhadap perizinan yg telah diterbitkan?	Belum ada	
15	Apakah ada sanksi pemilik bangunan gedung untuk pembangunan yang tidak sesuai PBG yg sudah diterbitkan (luasan, desain, RTH, sanitasi, dll)? Apa bentuk sanksinya ?	Belum ada	
16	Dalam penyelenggaraan PBG dan SLF apakah sudah mengacu sepenuhnya pada PP No. 16 Tahun 2021?	Sudah	
17	Terkait dengan retribusi, apakah sudah ada Perda retribusi untuk PBG dan SLF?	Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	
18	Apakah ada aturan-aturan tambahan yg diterbitkan oleh Pemerintah Daerah terkait PBG dan SLF?	Tidak ada	
19	Apakah sudah ada Perda RDTR dan RTBL, kalau belum prosesnya sudah sampai dimana?	Belum ada	
20	OPD Teknis, apakah sudah ada tenaga Pengelola Teknis Bangunan Gedung Negara yang bersertifikat ? Kalau ada, berapa orang?	Belum ada	

NO.	PERTANYAAN	JAWABAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)

Painan, 24 Oktober 2024

Tim Koordinasi Penyelenggaraan Bangunan Gedung
UPTD P2BG Dinas BMCKTR Provinsi Sumatera Barat

1. YUDHI P. MARUF
2. DESI MARIA
3. FAJRINA SARI
4. EDI ANDRYA
5. FRISKA MIRZA FAIRUZ



Diketahui Oleh :

Kepala UPTD P2BG
Dinas BMCKTR Prov. Sumbar



Yudi Herawan, S.T., M.T.
Nip. 19740311 199803 1 003



YUDHI PERMADI MARUF
NP. 19990713201502 1002



DESI MARIA